

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Capaian Visi, Misi, Dan Prioritas Daerah

A.1. Capaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2019

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 merupakan tahun pertama dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2019 digambarkan dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Gambaran ketercapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada setiap misi dijelaskan sebagai berikut.

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyub untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jawa Tengah sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk membutuhkan kesadaran akan toleransi dan saling menghargai yang tinggi dalam rangka menjaga keguyuban dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam suku, agama, dan ras tinggal di Jawa Tengah, meliputi 74,3 persen merupakan suku Jawa, 5,9 persen suku Madura, 5,6 persen suku Sunda, 5,6 persen suku Batak, dan 4,5 persennya lain-lain. Sikap toleransi dan guyub yang dibangun masyarakat Jawa Tengah selama ini dinilai mampu mengurangi potensi diskriminasi dan konflik bernuansa SARA di Jawa Tengah. Bahkan tingkat kerukunan antar umat beragama di Jawa Tengah termasuk kategori cukup tinggi di Indonesia. Kondisi ini juga mencerminkan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang membawa masyarakat Jawa Tengah pada rasa aman dan nyaman.

Meskipun demikian masih juga ditemukan konflik bernuansa SARA di Jawa Tengah yang terjadi di tahun 2019. Antara lain kasus pencabutan izin gereja Dermolo di Jepara, penolakan kajian majelis tafsir Al-Qur'an di Kabupaten Kebumen, dan intoleransi warga Papua di Jawa Tengah. Menyikapi kasus konflik tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan aparat sudah melakukan langkah-langkah penanganan dan mediasi. Disamping juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah timbulnya lagi konflik-konflik tersebut di masyarakat.

Dalam rencana pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan, upaya membangun sikap toleransi dan guyup diwujudkan melalui penjabaran misi pertama ini. Tujuan yang diharapkan dari misi ini adalah dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, maupun konflik bernuansa SARA, serta dapat tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik. Berbagai macam praktek toleransi di Jawa Tengah telah dilakukan selama ini baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Misalnya Gubernur Jawa Tengah kerap mengajak masyarakat untuk memahami keberagaman dengan membangun komunikasi publik atau rembukan bersama masyarakat. Rembukan antar kelompok masyarakat, kelompok agama, pimpinan dan masyarakat dilakukan secara intens dengan gaya yang informal, saling berkunjung, serta tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan, yang diharapkan akan mendorong masyarakat untuk bisa toleran.

Jawa Tengah Kampung Bhinneka juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjaga sikap kebangsaan dan toleransi di masyarakat. Dalam Kampung Bhinneka ini menyajikan berbagai kegiatan seperti dialog kebangsaan, seni budaya, kuliner, serta menampilkan keunikan masing-masing suku di Indonesia. Pemerintah Jawa Tengah juga mendorong pembentukan Forum Perantara (Persatuan Antar Etnis) yang terdiri dari berbagai suku dan agama di Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama, kerukunan antarumat, dan pembauran kebangsaan.

Selain itu, edukasi kepada siswa di sekolah juga menjadi langkah upaya pemerintah Jawa Tengah untuk membangun sikap toleransi, dan guyup di lingkungan sekolah. Bahkan pemerintah provinsi Jawa Tengah juga mulai mengembangkan "sekolah toleransi" dalam rangka membangun kesadaran anak sekolah tentang keberagaman, sikap toleransi, guyup, serta mencegah internalisasi paham radikalisme di sekolah.

Kegiatan lain yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan nilai-nilai religius, membangun sikap toleransi dan guyub, dalam kerangka kebangsaan NKRI antara lain koordinasi dengan aparat keamanan dan memantau setiap perkembangan berbagai konflik di Jawa Tengah, termasuk bahaya laten terorisme, radikalisme dan tindakan-tindakan intoleransi lainnya, peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang kewaspadaan dan deteksi dini, kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat oleh Polda Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah dan Kanwil Kemenkumham RI, dan berbagai program kamtibmas lainnya yang mendukung terpeliharanya kondusivitas Jawa Tengah.

Berikut gambaran pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pada misi pertama dalam rangka membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2019.

Tabel 3.1
Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	7,14	15,00	15,38	102,53
2	Indeks Toleransi	Angka	76,30	74,40	72,50	97,45
3	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	73,73	80,00	80,98	101,23

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 – 65,99%
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Dari ketiga indikator tersebut, seluruhnya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi. Untuk indikator Indeks Toleransi sebesar 72,50 ditahun 2019 dipengaruhi oleh adanya momen pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2019 yang memunculkan perilaku saling sindir, dan perdebatan antar masyarakat dan kelompok masyarakat yang berujung pada konflik sosial, politik, maupun konflik bernuansa SARA di masyarakat.

2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota

Reformasi birokrasi di Jawa Tengah sudah menjadi fokus pembenahan sejak periode RPJMD yang lalu. Dalam *taglinenya*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan keseriusan dalam upaya reformasi birokrasi yaitu "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapus*". *Tagline* ini diperuntukkan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju pada pelayanan publik yang prima, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, kualitas SDM aparatur yang berkualitas dan berintegritas, serta sistem tata kelola kelembagaan yang efisien.

Menghadapi era digital saat ini, Pemerintah Provinsi juga merespon dengan cepat melalui kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemanfaatan berbagai macam media sosial sebagai media komunikasi dengan publik menjadi salah satu keunggulan pemerintahan Jawa Tengah saat ini. Dengan media sosial yang terbuka dan berbagai aplikasi informasi yang mudah diakses mendorong kecepatan respon birokrasi Jawa Tengah atas berbagai masukan, kritik, dan keluhan masyarakat. Pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah secara virtual melalui media sosial dan aplikasi elektronik lainnya menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Jawa Tengah saat ini.

Gubernur Jawa Tengah juga selalu mendorong seluruh aparatur pemerintahan Jawa Tengah untuk mengoptimalkan dunia digital. Koordinasi dengan berbagai level termasuk jejaring hingga tingkat kabupaten/kota dalam pelayanan masyarakat, dan juga rapat-rapat dapat digelar secara *online*. Maka informasi dari masyarakat akan lebih cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah Jawa Tengah. Berbagai media aplikasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk pengaduan maupun aplikasi pelayanan publik yang ada di perangkat daerah antara lain Lapor Gub, Sakpole, iJateng, Teleapik (*Teyeng Ndeleng* Pendaftaran Lan Poliklinik), dan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur pemerintahan secara internal menuju Jateng *Smart Province*, telah juga dikembangkan dan dimanfaatkan berbagai aplikasi pemerintahan (*e-government*) antara lain *Government Resources Management System* (GRMS) yang berisi bermacam aplikasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengendalian dan evaluasi secara terintegrasi, aplikasi *e-office* untuk mendukung pengelolaan administrasi perkantoran menuju *paperless*, penerapan tanda tangan secara elektronik (TTE), dan lainnya. Dalam upaya perwujudan pengawasan dan integritas ASN juga dilakukan berbagai macam kegiatan antara lain pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendorong pembentukan Zona Integritas di tiap-tiap perangkat daerah, internalisasi kurikulum integritas dalam pendidikan dan pelatihan aparatur, penguatan kapasitas APIP, dan sebagainya.

Yang masih menjadi catatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat dilakukan kedepan adalah berkaitan dengan pendorongan reformasi birokrasi di kabupaten/kota sebagaimana dicita-citakan dalam misi kedua RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Upaya-upaya fasilitasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota bukan tidak pernah dilakukan. Secara rutin pemerintah provinsi melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik dan bersih. Namun demikian masih dijumpai beberapa kasus di kabupaten/kota yang berkaitan dengan komitmen integritas mulai dari kepala daerah sampai ke jajaran pemerintahannya. Pemerintah provinsi juga terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk perbaikan penyelenggaraan manajemen pemerintahan menuju efektif, efisien dan akuntabel, serta optimal dalam pelayanan publik secara terbuka, cepat, dan responsif.

Berikut digambarkan pencapaian kinerja misi kedua dalam RPJMD yang berkaitan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota di tahun 2019. Dari 8 (delapan) indikator kinerja pada misi ke-2 ini di tahun 2019 seluruhnya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Tabel 3.2
Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74,75	75,50	76,99	101,97
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,36	80,00	82,54	103,17
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,68	2,76	3,85	139,49
4	Nilai SAKIP	Angka	80,18	80,00	81,56	101,96
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,43	3,45	3,50*)	101,45
6	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100
7	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	na	17,00	24,80	145,88
8	Indeks Sistem Merit	Angka	0,66	0,67	0,70	104,48

Keterangan:

- a. Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:
 - 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
 - 2) Tinggi : 76 – 90,99%
 - 3) Sedang : 66 – 75,99%
 - 4) Rendah : 51 – 65,99%
 - 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$
- b. Angka realisasi dengan tanda *) merupakan angka proyeksi sementara capaian tahun 2019

3. Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Membuka Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ketiga ini menjabarkan tentang kondisi kemiskinan dan pengangguran, serta perekonomian daerah yang diharapkan dapat tercapai dalam lima tahun kedepan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Jawa Tengah terus menurun. Angka kemiskinan di tahun 2019 bulan September sebesar 10,58 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,68 juta jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah dari Bulan Maret - September 2019 tercatat merupakan penurunan tertinggi se-Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 63.830 jiwa keluar dari kelompok penduduk miskin yaitu dari sebanyak 3,74 juta jiwa menjadi 3,68 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan periode bulan September tahun 2018 kinerja penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018-2019 sebesar 0,61 persen yaitu dari 11,19 persen menjadi 10,58 persen.

Penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2019 masih lebih banyak terkonsentrasi di pedesaan dibandingkan perkotaan. Di tahun 2019, angka kemiskinan pedesaan sebesar 12,26 persen atau sebanyak 2,08 juta jiwa, dan angka kemiskinan perkotaan sebesar 8,99 persen atau sebanyak 1,6 juta jiwa. Garis kemiskinan yang menjadi tingkat batas minimum pengeluaran yang dinilai perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup layak di Jawa Tengah tahun 2019 adalah sebesar 381.992 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh komponen komoditi bahan makanan yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Sementara komoditi bukan makanan yang dinilai berpengaruh terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan kesehatan.

Penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah bukan hanya keberhasilan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan kinerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja bersama mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain telah melakukan program Satu OPD Satu Desa Dampingan menuju desa lebih sejahtera, dengan metode pendampingan yang lebih menekankan kepada identifikasi masalah dan menyelesaikan solusinya. Lokus sasaran program ini adalah pada desa dengan jumlah rumah tangga yang masuk desil 1 dan 2 lebih banyak dibandingkan dengan desa lain dalam 1 kecamatan.

Upaya lain yang juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama untuk mengurangi beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan stimulan rumah sederhana layak huni, bantuan siswa miskin (BSM), SMK *boarding* bagi siswa miskin berprestasi, pemberian jamkesda, stimulan jamban, pemenuhan sambungan listrik murah, bantuan melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) bagi penduduk miskin non produktif, dan lainnya. Dan untuk menstimulan peningkatan pendapatan penduduk miskin juga dilakukan upaya-upaya antara lain pemberian bantuan modal, fasilitasi kredit perbankan murah, fasilitasi pendorongan *startup* wirausaha, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan sebagainya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan didukung dengan validasi data bersama dengan instansi terkait yang dilakukan setiap 6 bulan.

Kondisi pengangguran di Jawa Tengah yang ditunjukkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2019 mencapai angka sebesar 4,49 persen atau sebanyak 820 ribu orang. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 pada periode yang sama, dimana di tahun 2018 TPT sebesar 4,51 persen. Proporsi pengangguran terbesar berasal dari lulusan SMK sebesar 10,16 persen, dan lulusan SMA sebesar 6,35 persen. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mengurangi pengangguran antara lain memberi kemudahan dalam proses perijinan usaha untuk mendorong investasi sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk menyiapkan kurikulum pendidikan SMK agar sesuai dengan kebutuhan, revitalisasi BLK untuk peningkatan kapasitas keterampilan tenaga kerja, dan mendorong pihak swasta melalui CSR untuk berperan mempersiapkan generasi muda yang produktif dan berdaya saing.

Sementara itu untuk kondisi perekonomian daerah Jawa Tengah di tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 5,41 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,31 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah mengalami penguatan dari 4,35 persen di tahun 2018 menjadi 5,19 persen di tahun 2019. Demikian juga sektor perdagangan mengalami penguatan dari 5,77 persen di tahun 2018 menjadi 5,98 persen di tahun 2019. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan dari 2,63 persen di tahun 2018 menjadi 1,36 persen di tahun 2019. Kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2019 mengakibatkan tanaman pertanian tidak tumbuh dengan baik sehingga produksinya menurun akibat puso.

Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan pertumbuhan, namun berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut mendorong pertumbuhan sektor ini. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan jaringan irigasi, bantuan penggunaan bibit/benih unggul dan bermutu, bantuan penggunaan pupuk berimbang, gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), fasilitasi paska panen berupa bantuan alat paska panen, bantuan alsintan, dan pengembangan sumberdaya petani dengan mendorong pemuda tani dalam bentuk bimbingan teknis petani milenial. Hal ini juga dilakukan dalam upaya mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) dari sisi produksi.

Upaya lain yang juga dilakukan dari sub sektor perikanan antara lain pengembangan fungsi pelabuhan sebagai pusat aktifitas perekonomian masyarakat nelayan, pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan (jaring dan bubu), *coolbox*, alat bantu navigasi, serta bantuan premi asuransi bagi nelayan kecil. Upaya lainnya adalah peningkatan penjaminan kesehatan dan mutu ikan serta keamanan pangan melalui penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) bagi pemasok bahan baku di Jawa Tengah.

Dari sub sektor kehutanan juga telah mengupayakan berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan lapangan usaha ini terutama adalah dengan melakukan penanaman bibit pohon ±23.308,85 ha (eq. 9.323.540 batang), memfasilitasi berbagai kelompok masyarakat dengan memberikan sarana produktif bagi kelompok-kelompok masyarakat, antara lain Kelompok Tani Hutan, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan yang positif juga karena didukung dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya tersebut antara lain peningkatan mutu produksi industri, pendampingan kemitraan usaha antara industri kecil dengan industri inti, pendampingan dan fasilitasi standarisasi produk, fasilitasi pendaftaran HAKI, peningkatan kualitas SDM dan sertifikasi kompetensi SDM, fasilitasi substitusi bahan baku impor, dan mendorong persebaran industri melalui pembukaan kawasan industri dan sentra UKM. Strategi lainnya yang telah dilakukan

yaitu peningkatan ekspor non migas dengan membuka pasar baru tujuan ekspor, pemantauan dan publikasi harga pasar, pemanfaatan aplikasi pasar lelang komoditi, serta mendukung terwujudnya sistem logistik daerah dengan penyusunan data distributor dan data gudang barang pokok penting di Jawa Tengah. Salah satu strategi yang cukup mendukung pemasaran produk-produk IKM dan UKM Jawa Tengah adalah dengan digitalisasi ekonomi dengan mengembangkan *e-commerce* dan mendorong pemanfaatan *e-commerce* oleh pelaku usaha baik usaha kecil maupun menengah.

Pertumbuhan investasi juga terus didorong dengan berbagai strategi yang telah dilakukan di tahun 2019 antara lain dengan mengoptimalkan kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan LKPM melalui klinik LKPM. Selain itu juga dilakukan pengembangan promosi melalui *digital promotion* dengan *platform* media sosial, mendorong kemitraan usaha PMA/PMDN dengan UKM melalui *match making*, optimalisasi peran Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk mendapatkan solusi penanaman modal, mengadakan tur investasi yaitu fasilitasi calon investor yang serius terhadap proyek yang ditawarkan di Jawa Tengah, serta *business meeting* dalam dan luar negeri. Peningkatan pelayanan perijinan juga terus dioptimalkan melalui pendampingan OSS, pelayanan perijinan melalui aplikasi SIAP Jateng (Sistem Informasi Aplikasi Perijinan), dan layanan jemput bola (mobil pelayanan perijinan keliling), dan mendorong kabupaten/kota untuk mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Sedangkan untuk mendukung pengembangan pariwisata di Jawa Tengah telah juga dilakukan beberapa upaya antara lain percepatan penataan dan kerjasama pengelolaan 4 Kawasan KSPN/KSPP (Karimunjawa, Borobudur, Dieng, dan Sangiran), pengembangan dan pemberdayaan desa wisata (pembinaan pengelolaan desa wisata), sertifikasi usaha jasa dan sarana pariwisata, sertifikasi SDM pariwisata dan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif (kriya, kuliner, fashion dan seni pertunjukan), pengembangan dan pemberdayaan kelompok sadar wisata, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Desain *Brand*, dan pengembangan Kota Kreatif, promosi pariwisata skala nasional (*digital promotion* melalui sosial media) dan internasional (mengikuti pameran pariwisata skala internasional), serta penguatan sarana amenities pariwisata.

Langkah-langkah tersebut didukung dengan peningkatan infrastruktur tidak hanya jalan tetapi juga penyediaan air bersih, listrik, dan juga sanitasi, peningkatan pelayanan transportasi dengan penyediaan transportasi aglomerasi (BRT), dan fasilitasi pengembangan bandara dengan tetap memperhatikan aspek kewilayahan dan menjaga kondusivitas wilayah.

Berikut gambaran pencapaian kinerja misi ketiga RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam rangka memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 3.3
Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Kemiskinan	%	11,19	10,57-9,57	10,58	99,91
2	Indeks Gini	Angka	0,357	0,35	0,358	97,76
3	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,67	9,54	8,99	106,12
4	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	12,8	12,74	12,26	103,91
5	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	451,28*)	464,81	360,08	77,47
6	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	60,83*)	60,85	59,85	98,37
7	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,86*)	30,75	35,47	86,04
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	4,43	4,49	98,66
9	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,71*)	5,7	7,38	77,23
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,31	5,3-5,7	5,41	98,36***)
11	Inflasi	%	2,82	3,5±1	2,81	106,76
12	PDRB per kapita	Juta Rupiah	36,78	37,44	39,24	104,81
13	Indeks Williamson	Angka	0,620	0,6	0,619	96,93
14	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	2,62	2,9	1,36	46,90
15	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,35	4,85	5,19	107,01
16	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,77	5,67	5,98	105,47

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,0	3,15	12,47	395,87
18	Pertumbuhan investasi	%	15	9	0,39	4,33
19	Nilai Tukar Petani	Angka	103,64*)	101,2	106,00**)	104,74

Keterangan:

- a. Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:
 - 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
 - 2) Tinggi : 76 – 90,99%
 - 3) Sedang : 66 – 75,99%
 - 4) Rendah : 51 – 65,99%
 - 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$
- b. *) angka capaian tahun 2017
- c. **) angka capaian pada bulan Desember
- d. ***) dihitung realisasi/target dengan target pada angka 5,5%

Dari 19 indikator kinerja yang ada dalam misi ketiga ini, di tahun 2019 sebanyak 14 (empatbelas) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, 3 (tiga) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian tinggi, dan 2 (dua) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat rendah. Dua indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat rendah adalah pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertumbuhan investasi. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tidak tinggi meskipun tumbuh positif lebih besar dipengaruhi oleh sub sektor pertanian dan kehutanan. Faktor cuaca dimana di tahun 2019 terjadi kemarau panjang cukup memberikan dampak pada produksi pertanian, bahkan banyak yang mengalami puso. Sedangkan sub sektor kehutanan lebih banyak dipengaruhi faktor produksi kayu yang berasal dari Perum Perhutani mengalami penurunan cukup drastis karena permintaan pasar yang juga menurun, serta mulai bergesernya pemanfaatan ekonomi dari kawasan hutan sebagai sumber produksi kayu menjadi pariwisata dan jasa lingkungan, yang dalam perhitungan PDRB tidak termasuk dalam variabel perhitungan sumber PDRB sub sektor kehutanan.

Sementara realisasi penanaman modal di Jawa Tengah mencapai Rp 59,5 Trilyun dari target realisasi sebesar Rp. 47,42 Trilyun, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 naik sebesar Rp. 234 miliar atau tumbuh mencapai 0,39 persen. Realisasi penanaman modal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kondisi perekonomian global dan nasional yang cenderung melambat; menurunnya realisasi investasi PMDN karena adanya beberapa investor yang membatalkan rencana investasinya karena menunggu kepastian implementasi beberapa kebijakan pemerintah di bidang investasi; adanya kesulitan investor dalam mencari lahan sesuai peruntukan karena belum semua kabupaten/kota mempunyai Perda RTRW meskipun demikian kinerja investasi Jawa Tengah berada pada urutan ke tiga Nasional setelah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

4. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan

Misi keempat menjabarkan tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, serta upaya mewujudkan kualitas lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan risiko bencana.

Jawa Tengah di tahun 2019 sudah mendapatkan bonus demografi, dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Tantangan dari terjadinya bonus demografi antara lain adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dalam konteks pembangunan manusia Jawa Tengah paripurna. Indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan manusia dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia, dimana IPM Jawa Tengah di tahun 2019 mencapai angka 71,73 termasuk kategori tinggi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia di Jawa Tengah antara lain dilakukan melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan yang telah diupayakan antara lain dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah melalui peningkatan kualitas dan distribusi sarana prasarana pendidikan yang sesuai standar, peningkatan kualitas guru dan distribusinya secara merata, peningkatan akses layanan pembiayaan pendidikan dengan pemberian BSM, BOSDa untuk sekolah negeri dan swasta, serta BOP untuk sekolah negeri dan swasta. Untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah pemerintah provinsi Jawa Tengah juga mendorong pendidikan nonformal melalui pendidikan Paket A/B/C di kabupaten/kota terutama bagi penduduk yang tidak sekolah atau putus sekolah.

Peningkatan literasi bagi masyarakat juga terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu untuk masyarakat melalui berbagai program diantaranya pengembangan perpustakaan digital (iJateng), perpustakaan keliling dengan mobil pustaka, internalisasi gerakan wajib membaca untuk anak sekolah, dan sebagainya

Sedangkan untuk mendorong peningkatan harapan hidup bagi masyarakat, pemerintah provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan berbagai upaya diantaranya merubah paradigma kesehatan dari kuratif rehabilitatif menjadi preventif dan promotif dengan membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas, pembudayaan olahraga di lingkungan kerja, serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak dengan program 5 Ng (*Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*). Dan yang menjadi unggulan lainnya adalah program Rumah Sakit Tanpa Dinding (RSTD) yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dinas Kesehatan bersama dengan rumah sakit mendorong reorientasi pelayanannya dari kuratif dan rehabilitatif menuju preventif dan promotif.

Akses program RSTD ini berada dalam ranah *Pra-Hospital, Intra-Hospital dan Pasca-Hospital*, yang berorientasi pada individu maupun masyarakat, baik sehat maupun yang sakit dengan harapan yang sehat tetap sehat, yang sakit menjadi sehat dan tidak jatuh sakit kembali. RSTD menghilangkan pola pelayanan "*Hospital Oriented*". Rumah Sakit merombak pola pelayanan menjadi pola "*Community based*", yaitu pola pelayanan yang berbasis masyarakat.

Pembangunan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan juga dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Peningkatan kesempatan mendapatkan pendidikan yang setara bagi perempuan, kesempatan yang sama dalam pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fokus pembangunan *gender* di Jawa Tengah. Langkah kongkrit yang telah dilakukan antara lain pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan pendampingannya yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pembangunan lingkungan juga menjadi perhatian di era pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Ukuran kinerja pembangunan lingkungan di Jawa Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang saat ini angkanya mencapai 66,88 di tahun 2019, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 66,53. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah antara lain penanaman di lahan seluas kurang lebih 23.308,85 hektar, membangun bangunan konservasi berupa Sumur Resapan dan Dam Penahan untuk meningkatkan resapan air ke dalam tanah, melakukan GPS (Gerakan Pungut Sampah) dalam berbagai even sebagai bentuk kampanye lingkungan, mendorong semakin bertumbuhnya PROKLIM (Program Kampung Iklim), melaksanakan PROPERDA (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), memfasilitasi berbagai kelompok masyarakat melalui penyediaan sarana produktif bagi kelompok-kelompok masyarakat, antara lain Kelompok Tani Hutan, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Disamping itu juga memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mengelola lingkungan, misalnya penyediaan IPAL komunal bagi UMKM, peralatan pengelola sampah, dan sebagainya.

Pembangunan Jawa Tengah juga telah menuju pembangunan berbasis risiko bencana. Sebagaimana diketahui bahwa Jawa Tengah dikenal sebagai supermarket bencana, dimana tingkat risiko bencana hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah adalah tinggi. Sebagai bentuk mitigasi terhadap bencana, berbagai upaya telah dilakukan yang diantaranya adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana sebagai lembaga terdepan yang harus siap menghadapi kejadian bencana. Selain itu pemasangan *early warning system*, penguatan kapasitas relawan dan tagana juga dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi risiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Kegiatan unggulan lain dalam rangka penanggulangan bencana di tahun 2019 antara lain ekspedisi destana tsunami yang merupakan kolaborasi antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BNPB sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa dalam bentuk sosialisasi dan simulasi penanganan bencana tsunami. Kegiatan lain adalah *sister village* (desa saudara) yang merupakan upaya penanganan bersama dalam penanggulangan bencana dalam menentukan titik evakuasi lintas batas administrasi. Kegiatan lain yang menjadi unggulan juga adalah sekolah aman bencana yang merupakan upaya mendorong pembentukan masyarakat tangguh bencana di sektor pendidikan dengan target anak sekolah dalam bentuk sekolah sungai dan sekolah madrasah aman bencana.

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja indikator pada misi 4 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia, serta peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan risiko bencana di Jawa Tengah. Dari 10 indikator kinerja dalam misi keempat ini seluruhnya berada pada tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Tabel 3.4
Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,12	71,6	71,73	100,18
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,35	7,37	7,53	102,17
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,84	12,68	98,75
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,18	74,31	74,23	99,89
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,95	92	91,89	99,88
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,53	66,69	66,88	100,28
7	Indeks Kualitas Air	Angka	51,14	48,17	50,47	104,77
8	Indeks Kualitas Udara	Angka	82,97	84,51	84,81	100,35
9	Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,53	66,76	65,73	98,46
10	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	0,3501	3,52	3,52	100

Keterangan:

- a. Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:
 - 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
 - 2) Tinggi : 76 – 90,99%
 - 3) Sedang : 66 – 75,99%
 - 4) Rendah : 51 – 65,99%
 - 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$
- b. *) angka proyeksi capaian di tahun 2019

A.2. Capaian Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk pencapaian per prioritas daerah di tahun 2019 dapat dijabarkan berikut.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas penanggulangan kemiskinan di tahun 2019 diarahkan pada penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, penguatan *sustainable livelihood* atau keberlanjutan perekonomian masyarakat, serta didukung dengan penguatan tata kelola kelembagaannya.

Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 29 Kabupaten dan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi, air bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh; penanganan rumah terdampak bencana; peningkatan akses pendidikan berupa pemberian BSM, SMK *Boarding School* di 3 wilayah; kesehatan dengan upaya untuk

mencapai *Universal Health Care* (UHC) atau jaminan pemeliharaan kesehatan untuk semua penduduk yang ditopang pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar, berkualitas, dan terjangkau; pangan; pemberdayaan sosial berbasis kelompok (*social group work*), jaminan sosial bagi PMKS non potensial dan terlantar termasuk difabel dan lanjut usia berbasis individu dan keluarga (*Sosial Case Work*) serta perlindungan sosial berbasis kelembagaan melalui pelayanan sosial dalam panti serta pembangunan dan pengembangan panti pelayanan sosial sesuai standar pelayanan minimal (SPM); dan kepemilikan administrasi kependudukan berupa fasilitasi pengurusan dokumen KTP-el.

Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan perekonomian masyarakat) melalui keberantaraan akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; pemberdayaan kelompok usaha pertanian; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan; serta fasilitasi pengembangan BUMDes.

Kedua strategi tersebut didukung dengan penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan seluruh komponen potensi (swasta dan pihak lainya) dalam kesetiakawanan sosial.

Prioritas penanggulangan kemiskinan ini dilakukan melalui 14 (empat belas) program prioritas pembangunan daerah, yaitu:

- a. Program Pembinaan SMK;
- b. Program Pelayanan Kesehatan;
- c. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi;
- d. Program Pembangunan Perumahan;
- e. Program Penanganan Kawasan Permukiman;
- f. Program Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. Program Rehabilitasi Sosial;
- h. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- i. Program Penanganan Fakir Miskin;
- j. Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi;
- k. Program Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- l. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- m. Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut; dan
- n. Program Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi.

Tingkat keberhasilan kinerja empat belas program prioritas daerah tersebut yang dilaksanakan guna mendukung prioritas penanggulangan kemiskinan diukur dari tingkat ketercapaian indikator kinerja pada masing-masing program. Total indikator kinerja dari 14 program tersebut adalah sebanyak 49 indikator. Dari ke-49 indikator kinerja tersebut, seluruhnya dinilai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi di tahun 2019.

2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 yang kedua adalah penguatan daya saing ekonomi daerah, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing, peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan, optimalisasi potensi sumber daya hutan, peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, dan menengah, pengembangan inovasi teknologi, peningkatan pariwisata berbasis masyarakat, serta perbaikan iklim investasi.

Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan mendukung ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi dan waduk/embung; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi balai benih; pengembangan kartu tani; pengembangan pertanian organik; inisiasi pertanian terintegrasi. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).

Dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dilakukan melalui peningkatan kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan untuk ekspor; pengembangan kartu nelayan; perlindungan dan asuransi nelayan.

Optimalisasi potensi sumber daya hutan dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman, hutan rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.

Sedangkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, dan menengah dilakukan melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keberantaraan akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan kawasan industri dan industri pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja; keberantaraan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia. Upaya itu didukung juga dengan pengembangan inovasi teknologi, serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.

Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat (*local based community*) dilakukan melalui perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; peningkatan promosi wisata; kerjasama dengan pelaku wisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.

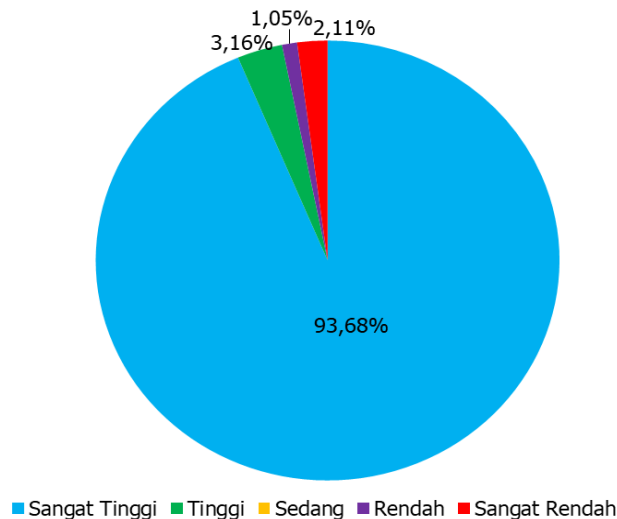
Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif dilakukan melalui pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah; pengembangan *digital investment promotion*; pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi hijau.

Dalam rangka pencapaian prioritas penguatan daya saing ekonomi daerah di tahun 2019 ini didukung dengan 34 program prioritas pembangunan daerah, meliputi:

- a. Program Pengembangan dan Pembinaan Teknis SDA;
- b. Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku;
- c. Program Pemasarakatan Perkoperasian;
- d. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi;
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
- f. Program Peningkatan Produktivitas KUKM;
- g. Program Pendidikan Perkoperasian dan UKM;
- h. Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- i. Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- j. Program Pelayanan Perijinan;
- k. Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- l. Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan;
- m. Program Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Peijinan;
- n. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- o. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- p. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- q. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- r. Program Usaha dan Pengembangan Komoditas;
- s. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- t. Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut;
- u. Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
- v. Program Pengembangan Agribisnis;
- w. Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian;
- x. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
- y. Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri;
- z. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor;
- aa. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen;
- bb. Program Penguatan dan Pengembangan Industri Agro;
- cc. Program Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro;
- dd. Program Pengembangan Teknologi Logam dan Kayu;
- ee. Program Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- ff. Program Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki;
- gg. Program Pengembangan Kemasan dan Industri Kreatif; dan
- hh. Program Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah.

Indikator yang menggambarkan keberhasilan program yang mendukung prioritas ini sebanyak 95 indikator kinerja. Tingkat keberhasilan seluruh indikator kinerja tersebut di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. 89 indikator kinerja (93,68%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi;
- b. 3 indikator kinerja (3,16%) dengan tingkat ketercapaian tinggi;
- c. 1 indikator kinerja (1,05%) dengan tingkat ketercapaian rendah; dan
- d. 2 indikator kinerja (2,11%) dengan tingkat ketercapaian sangat rendah.



Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Gambar 3.1

Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2019

Dua indikator kinerja yang dinilai tingkat ketercapaiannya sangat rendah di tahun 2019 adalah:

- a. Persentase peningkatan produksi kedelai, dengan tingkat ketercapaian 40%;
- b. Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH Banyumas, dengan tingkat ketercapaian 41%.

3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM Dalam Rangka Mendukung Bonus Demografi

Prioritas pembangunan ketiga adalah terkait dengan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia, yang diarahkan pada upaya perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, pengembangan rumah sakit tanpa dinding, mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, peningkatan peran serta Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan, pembibitan, pembinaan, dan masyarakat olahraga, pembinaan dan pengembangan kebudayaan, serta peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus utamanya bagi siswa dari keluarga kurang mampu berupa BOS/BOP SMA, BOS/BOP SMK, BOS/BOP SLB; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*; pengembangan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan provinsi; dan mendukung pengembangan kegiatan keagamaan di daerah.

Pengembangan "Rumah Sakit Tanpa Dinding" dilakukan melalui sistem rujukan berbasis teknologi informasi di 7 RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penguatan dan fasilitasi kesehatan primer, pelayanan kesehatan di ruang publik, pengadaan rumah sakit lapangan untuk pelayanan bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan mudik, pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat melalui bakti sosial; peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; perbaikan gizi masyarakat termasuk juga untuk mempercepat penurunan *stunting*; memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; mempercepat pelaksanaan upaya promotif preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan) termasuk melibatkan peran dunia usaha; pemerataan cakupan pembiayaan pelayanan kesehatan non kuota; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar; peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; peningkatan kualitas tenaga kesehatan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan obat makanan dan minuman.

Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi dilakukan melalui penguatan program pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi berstandar nasional dan/atau internasional); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana dilakukan melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan; peningkatan upaya pencegahan dan kualitas layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan pemenuhan hak anak; penyusunan kebijakan pengendalian penduduk serta peningkatan kesertaan KB MKJP, penurunan *unmetneed* KB, peningkatan peran bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia, dan peningkatan kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Sedangkan peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilakukan melalui penguatan pengetahuan dan

ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dilakukan melalui sistem otomasi perpustakaan yang terintegrasi dengan pelayanan *online system* (RFID untuk keamanan bahan perpustakaan dan pengembalian buku otomatis oleh pemustaka), serta kemudahan akses koleksi buku melalui *smartphone* berbasis android (iJateng).

Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan dilakukan dilakukan melalui peningkatan karakter dan nasionalisme pemuda, serta pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari melalui pola kemitraan, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan. Sedangkan untuk peningkatan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan dilakukan melalui pengembangan seni budaya, fasilitasi rumah budaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peningkatan kesejahteraan lanjut usia dilakukan melalui rehabilitasi lansia miskin terlantar; jaminan sosial lansia dengan bantuan permakanan bagi lansia non potensial; jaminan kesehatan bagi lanjut usia; perlindungan dan pemanfaatan pelayanan bagi lansia antara lain melalui penyediaan loket khusus lansia di puskesmas, penyediaan ruang tunggu khusus lansia; aksesibilitas ramah lansia dan difabel; peningkatan taraf hidup bagi lansia potensial

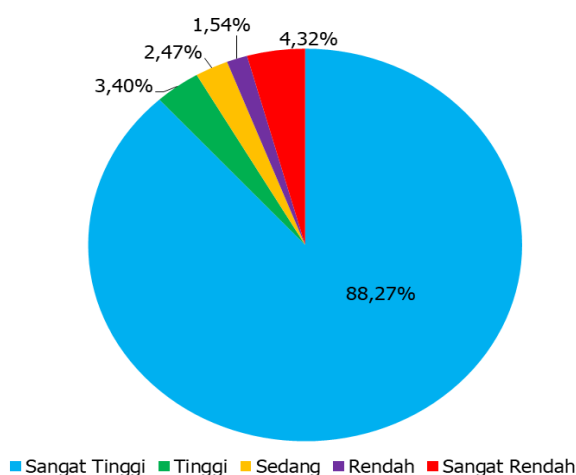
Program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan guna mendukung prioritas daerah ini sebanyak 30 program meliputi:

- a. Program Pembinaan SMA;
- b. Program Pembinaan SMK;
- c. Program Pembinaan Pendidikan Khusus;
- d. Program Pembinaan Kebudayaan;
- e. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- g. Program Kesehatan Masyarakat;
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- i. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit;
- j. Program Pelayanan Kesehatan;
- k. Program Sumber Daya Kesehatan;
- l. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- m. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- n. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD);
- o. Program Pemberdayaan Sosial;
- p. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- q. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- r. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

- s. Program Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;
- t. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
- u. Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
- v. Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
- w. Program Keluarga Sejahtera;
- x. Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Lembaga Kepemudaan;
- y. Program Peningkatan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda;
- z. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaa/Organisasi Olahraga;
- aa. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
- bb. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
- cc. Program Pengembangan Perpustakaan;
- dd. Program Pengelolaan Perpustakaan.

Dari 30 program prioritas daerah tersebut terdapat 324 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja program dalam mendukung prioritas peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah tahun 2019. Tingkat keberhasilan dari 324 indikator kinerja tersebut di tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

- a. 286 indikator kinerja (88,27%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi;
- b. 11 indikator kinerja (3,40%) dengan tingkat ketercapaian tinggi;
- c. 8 indikator kinerja (2,47%) dengan tingkat ketercapaian sedang;
- d. 5 indikator kinerja (1,54%) dengan tingkat ketercapaian rendah; dan
- e. 14 indikator kinerja (4,32%) dengan tingkat ketercapaian sangat rendah.



Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Gambar 3.2

Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Dan Daya Saing SDM Dalam Rangka Mendukung Bonus Demografi Tahun 2019

Keempat belas indikator kinerja yang tingkat kerjanya dinilai sangat rendah di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. APK SLB (di Cabang Dinas Wilayah 2,11), dengan tingkat ketercapaian rata-rata 41,33%;
- b. Disparitas prestasi SMA (di Cabang Dinas Wilayah 2,3,5,6,9,12,13), dengan tingkat ketercapaian rata-rata 32,43%;
- c. Disparitas prestasi SLB (di Cabang Dinas Wilayah 6,7,10), dengan tingkat ketercapaian rata-rata 39,78%;
- d. Disparitas prestasi SMK (di Cabang Dinas Wilayah 6,12), dengan tingkat ketercapaian rata-rata 29,48%.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana

Prioritas pembangunan daerah keempat ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari hulu ke hilir, serta penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

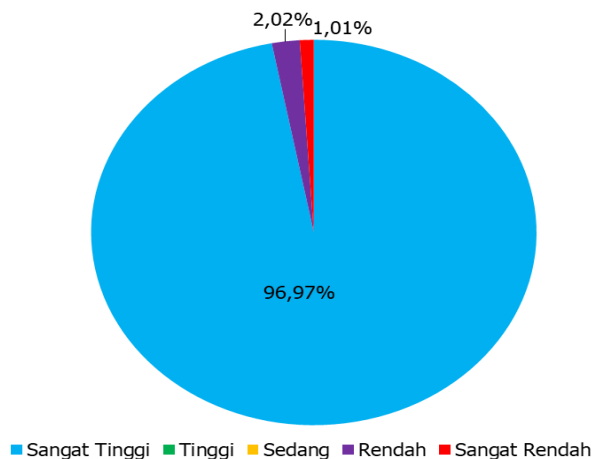
Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana dilakukan melalui peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik daerah rawan bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas ini sebanyak 10 (sepuluh) program prioritas meliputi:

- a. Program Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir;
- b. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas;
- d. Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;
- e. Program Pemanfaatan Hutan;
- f. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
- g. Program Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut;
- i. Program Pengembangan Kegeologian; dan
- j. Program Pertambangan Minerba.

Indikator program prioritas pembangunan tersebut sebanyak 99 indikator kinerja yang tingkat keberhasilannya di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 96 indikator kinerja (96,97%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi;
- 2 indikator kinerja (2,02%) dengan tingkat ketercapaian rendah; dan
- 1 indikator kinerja (1,01%) dengan tingkat ketercapaian sangat rendah.



Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Gambar 3.3 **Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana Tahun 2019**

Satu indikator kinerja yang tingkat kinerjanya dinilai sangat rendah di tahun 2019 adalah Persentase *good mining practice* Wilayah Solo, dengan tingkat ketercapaian sebesar 45,33%.

5. Perwujudan Ketahanan Pangan dan Energi

Untuk prioritas daerah kelima yaitu peningkatan ketahanan pangan dan energi diarahkan pada upaya perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan, serta pemerataan akses energi dan listrik.

Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan sarana pangan lokal, pengolahan, cadangan pangan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan korporasi tani, serta distribusi pangan; inisiasi sistem logistik daerah; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan; serta pengembangan dan penerapan inovasi pengolahan pangan.

Pemerataan akses energi dan listrik dilakukan melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.

Program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan guna mendukung prioritas ini sebanyak 5 (lima) program terdiri dari:

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- b. Program Pengembangan Agribisnis;
- c. Program Agribisnis Peternakan;
- d. Program Pengembangan Ketenagalistrikan; dan
- e. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Total indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut sebanyak 43 indikator kinerja. Dari 43 indikator kinerja semuanya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

6. Pengurangan Kesenjangan Wilayah

Upaya pengurangan kesenjangan wilayah di Jawa Tengah sebagai bentuk perwujudan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Penguatan infrastruktur konektivitas dilakukan melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis dan pemerataan antara wilayah, serta menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).

Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi dilakukan melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.

Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) yaitu 3 kawasan industri (Kabupaten Rembang, Brebes, Kebumen) dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).

Prioritas ini didukung dengan program prioritas daerah sebanyak 8 (delapan) program meliputi:

- a. Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan;
- b. Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan;
- c. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi;
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Program Pengembangan Perhubungan Darat; dan
- h. Program Pengembangan Perhubungan Laut.

Kinerja pelaksanaan program tersebut diukur dengan indikator kinerja sebanyak 60 indikator kinerja di tahun 2019 yang seluruhnya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

7. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Prioritas pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah tahun 2019 diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional, serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani dilakukan melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik.

Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dilakukan melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dengan tingkat maturitas APIP dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; serta meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN.

Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional dilakukan melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya *clean and clear government* dan menerapkan "keperantaraan dan *enterpreuneur*" dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi juga dilakukan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

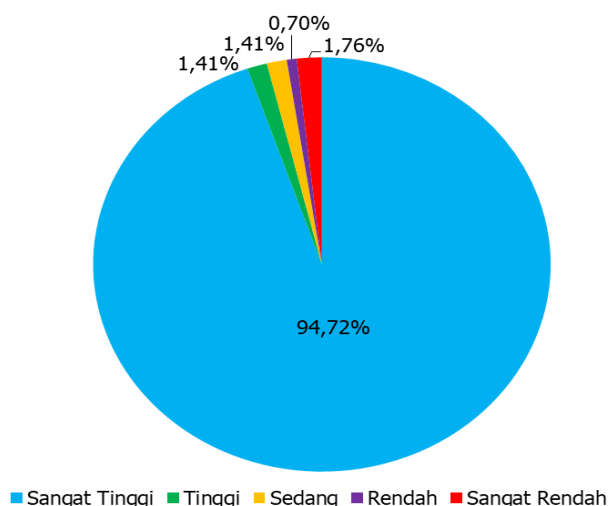
Program prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas ini sebanyak 44 program meliputi:

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- d. Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah;
- e. Program Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih;
- f. Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan;
- g. Program Penguatan Ketahanan Bangsa;
- h. Program Penguatan Politik Dalam Negeri;
- i. Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- j. Program Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- k. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- l. Program Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi;
- m. Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- n. Program Pengembangan E-Government;
- o. Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah;
- p. Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan;

- q. Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
- r. Program Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan;
- s. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya;
- t. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- u. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- v. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- w. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- x. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Program Pengelolaan Aset Daerah;
- z. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah;
- aa. Program Pengembangan Kompetensi ASN;
- bb. Program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi;
- cc. Program Sertifikasi Kompetensi ASN;
- dd. Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat;
- ee. Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP;
- ff. Pembangunan Budaya Integritas;
- gg. Peningkatan Manajemen Mutu;
- hh. Program Manajemen Resiko;
- ii. Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- jj. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- kk. Program Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah;
- ll. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- mm. Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan;
- nn. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- oo. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- pp. Program Peningkatan Layanan Kedewanan;
- qq. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat; dan
- rr. Program Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.

Guna mengukur keberhasilan kinerja pelaksanaan program tersebut ditetapkan indikator kinerja sebanyak 284 indikator kinerja, dengan tingkat keberhasilan di tahun 2019 sebagai berikut:

- a. 269 indikator kinerja (94,72%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi;
- b. 4 indikator kinerja (1,41%) dengan tingkat ketercapaian tinggi;
- c. 4 indikator kinerja (1,41%) dengan tingkat ketercapaian sedang;
- d. 2 indikator kinerja (0,70%) dengan tingkat ketercapaian rendah; dan
- e. 5 indikator kinerja (1,76%) dengan tingkat ketercapaian sangat rendah.



Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Gambar 3.4

Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Mendukung Prioritas Pemanfaatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Konduktivitas Wilayah Tahun 2019

Kelima indikator kinerja yang tingkat kinerjanya dinilai sangat rendah di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Persentase penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus, dengan tingkat ketercapaian 41,13%;
- b. Persentase penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang, UPPD Kabupaten Jepara, UPPD Kota Pekalongan, dan UPPD Kota Tegal, dengan tingkat ketercapaian 0% yang disebabkan di wilayah tersebut tidak memiliki obyek pajak PAP.

B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja perangkat daerah diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk capaian kinerja di tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 2 (dua) urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu urusan pendidikan dan kebudayaan. Dalam perencanaan kinerja dinas ini telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri dari 4 (empat) IKU urusan pendidikan dan 1 (satu) IKU urusan kebudayaan.

Dari kelima IKU tersebut di tahun 2019 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dan 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian rendah yaitu disparitas APK SMA/SMK/SLB. Keberhasilan pencapaian IKU didukung dengan

berbagai kegiatan pendidikan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain pemberian bantuan siswa miskin, BOS, BOP, BOSDa untuk sekolah swasta, penyelenggaraan pendidikan gratis di SMK *Boarding* terutama untuk siswa miskin berprestasi, peningkatan sarpras pendidikan, serta peningkatan kualitas guru. Sedangkan untuk kebudayaan telah juga dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pagelaran seni budaya, festival seni budaya, festival sastra, dan pengelolaan cagar budaya.

Berikut ini adalah gambaran pencapaian lima IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	86,5	87,5	97,44	111,36
2	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	7,37	7,28	12,68	57,41
3	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	76,01	77,07	78,14	101,39
4	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,06	0,07	0,07	100
5	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	3,15	3,5	3,8	108,57

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

2. Dinas Kesehatan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan di tahun 2019 menggambarkan keberhasilan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Dari kedelapan IKU Dinas Kesehatan di tahun 2019 seluruhnya dinilai tingkat capaiannya sangat tinggi diatas 100 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 juga mengalami peningkatan cukup tinggi, terutama pada indikator angka kematian ibu. Penerapan SPM juga dinilai tercapai yang dilihat dari indikator persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	AKI	100.000/KH	88	87	76,93	113,09
2	AKABA	1.000/KH	10,47	10,47	9,63	108,72
3	AKB	1.000/KH	8,50	8,3	8,22	100,97
4	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,18	0,2	0,2	100,00
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	43	45	46	102,22
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	%	100	100	100	100,00
7	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	45	50	65,50	131,00
8	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	47	52	82,90	159,42

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Tingkat keberhasilan pencapaian IKU yang tinggi tersebut didukung dengan berbagai program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Salah satu program yang menjadi unggulan Pemerintah Jawa Tengah adalah program 5 Ng (*Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*). Program ini dinilai cukup berhasil dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Jawa Tengah. Program gerakan lainnya yang juga dinilai berhasil adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Salah satu potensi unggulan spesifik yang dimiliki Jawa Tengah dibandingkan provinsi lain adalah pendirian 5 buah Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) sebagai UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah baru yang dapat diandalkan untuk mendukung pembinaan dan pengawasan agar implementasi Germas maupun sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat akan lebih berhasil ditahun mendatang.

Dan yang menjadi unggulan lainnya adalah program Rumah Sakit Tanpa Dinding (RSTD) yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dinas Kesehatan bersama dengan rumah sakit mendorong reorientasi pelayanannya

dari kuratif dan rehabilitatif menuju preventif dan promotif. Keunggulan RSTD ini akan mampu meningkatkan upaya penjangkauan sasaran pelayanan RS dimulai sejak sebelum masyarakat jatuh sakit dengan sasaran utama salah satunya komunitas sekolah/pesantren (*fase pra hospital*), selanjutnya menciptakan situasi dan lingkungan RS yang lebih sehat dan *safety* didukung juga dengan pemanfaatan/penyebaran IPTEK kedokteran melalui *telemedicine* (*fase intra hospital*), serta pasca dirawat dari RS masyarakat masih diberikan pelayanan dan fasilitasi oleh RS antara lain melalui pembentukan dan penguatan paguyuban pasien, home visit dan sejenisnya (*fase post hospital*).

3. RSUD Dr. Moewardi

Kinerja RSUD Dr. Moewardi diukur dari persentase capaian SPM, di tahun 2019 terealisasi 82,14 persen dari target 80 persen yang harus dicapai. Capaian ini dinilai telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut karena didukung dengan berbagai upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan rumah sakit bagi masyarakat.

Beberapa program unggulan dari RSUD Moewardi diantaranya adalah desa binaan, bakti sosial, pembinaan ke sekolah dokter, seminar dan *gathering, live streaming*, penyuluhan pada remaja dan masyarakat, pembuatan video promosi kesehatan dan edukasi, deteksi dini penyakit, serta sosialisasi pelatihan *first aid*.

4. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah persentase capaian SPM. Di akhir tahun 2019 realisasi indikator kinerja utamanya sebesar 88,00 persen dari target 87,59 persen, lebih tinggi dari targetnya.

Beberapa kegiatan RSTD yg sudah di lakukan RSMS pada aspek Pre Rumah Sakit adalah edukasi di sekolah dan pesantren tentang penyakit-penyakit, cara pencegahannya, dan hidup sehat; bantuan sarana cuci tangan (*wastafel*) di sekolah; serta renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat. Pada aspek Intra rumah sakit, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah senam diabetes pada paguyuban penderita DM seminggu sekali di RS, senam jantung sehat dengan paguyuban jantung sehat seminggu sekali di RS, *gathering* 2 kali setahun dengan penderita DM disertai edukasi terkait penyakit, *tele medicine (sms reminder)* kepatuhan minum obat pada pasien DM, serta *live streaming* edukasi penyakit melalui media sosial. Sementara pada aspek Pasca Rumah sakit, telah dilaksanakan *home visit* untuk pasien lanjut usia.

5. RSUD Tugurejo

Kinerja RSUD Tugurejo diukur dengan indikator kinerja utama persentase capaian SPM. Di akhir tahun 2019, capaian indikator tersebut sebesar 86,70 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar 85 persen. Capaian tersebut karena didukung dengan berbagai upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan rumah sakit bagi masyarakat. Beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi dari RSTD meliputi antara lain edukasi di PT Indofood tentang gangguan pendengaran; penyuluhan di radio fit secara periodik; dan pembentukan paguyuban dan pemberdayaan masyarakat.

6. RSUD Kelet Donorejo

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja RSUD Kelet Donorejo adalah persentase capaian SPM. Target yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar 80 persen, dan di akhir tahun 2019 tercapai 83,30 persen, lebih tinggi dari target. Capaian tersebut karena didukung

dengan berbagai upaya peningkatan pelayanan di rumah sakit, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan rumah sakit bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan antara lain memenuhi standar akreditasi rumah sakit berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menerapkan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai standar akreditasi, pengembangan pendaftaran *online* untuk mengurangi waktu tunggu, mengembangkan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi, serta menyediakan kanal pengaduan terhadap pelayanan kesehatan yang mudah di akses oleh masyarakat.

7. RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Ukuran keberhasilan RSUD Dr. Amino Gondohutomo dilihat dari indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase capaian SPM. Tahun 2019 ditetapkan target indikator sebesar 90 persen. Dan di akhir tahun 2019 realisasi kinerja indikator tersebut telah mencapai 99,59 persen, jauh melebihi angka target yang ditetapkan. Capaian tersebut karena didukung dengan berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain pendampingan desa binaan/desa dampingan yang diawali dengan identifikasi orang dengan gangguan jiwa, kepemilikan jamban, ibu hamil risiko tinggi, dan *stunting*; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan lainnya termasuk promosi pelayanan RSJD; pendidikan kesehatan bagi siswa sekolah; pemberdayaan mahasiswa kesehatan untuk pendampingan kader kesehatan jiwa; pengembangan sistem informasi rumah sakit berupa aplikasi deteksi dini kesehatan jiwa berbasis android (Sidewa, Sikopen, Ruko Jiwa); serta penyuluhan kesehatan di dalam rumah sakit.

8. RSJD Surakarta

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan kinerja RSJD Surakarta adalah persentase capaian SPM. Di akhir tahun 2019 realisasi indikator tersebut mencapai 98,38 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan targetnya sebesar 98,08 persen. Capaian tersebut karena didukung dengan berbagai upaya antara lain jambore rehabilitasi guna meningkatkan rasa percaya diri rehabilitasi, melatih kemampuan berkompetisi, melatih kemampuan sosialisasi, dan melatih kemampuan dalam manajemen *live skills, family support group* yaitu dengan memberikan pendidikan gangguan kesehatan jiwa kepada keluarga pasien, mencegah kekambuhan penderita gangguan jiwa dan meningkatkan kesehatan jiwa keluarga.

9. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Kinerja RSJD Dr. RM. Soedjarwadi di tahun 2019 diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) persentase capaian SPM, yang targetnya ditetapkan sebesar 80 persen. Di akhir tahun 2019, realisasinya telah mencapai 90,71 persen, lebih tinggi dari target. Capaian tersebut karena didukung dengan berbagai upaya antara lain deteksi gangguan jiwa anak, dan pojok produksi yaitu memberdayakan pasien untuk mencegah kekambuhan dan meningkatkan kemandirian.

Berikut ini rangkuman tingkat keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama dari 7 RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Utama 7 RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	RSUD Dr. Moewardi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	77,54	80	82,14	102,68
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	87,57	87,59	88,00	100,47
3	RSUD Tugurejo	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	84,44	85	86,70	102,00
4	RSUD Kelet Donorejo	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	80	80	83,30	104,13
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)	%	99,79	90	99,59	110,66
6	RSJD Surakarta	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	98,06	98,08	98,38	100,31
7	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	81,8	80	90,71	113,39

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

10. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Dinas ini menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dengan fokus pada bidang kebinamargaan dan keciptakaryaannya. Kinerja dinas ini diukur dari 5 (lima) indikator kinerja utama yang di akhir tahun 2019 seluruhnya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi. Hal ini didukung dengan kebijakan peningkatan infrastruktur dalam rangka peningkatan aksesibilitas serta distribusi barang dan jasa, dan mendukung peningkatan pemerataan perekonomian daerah.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	77,59	37,91	38,41	101,32
2	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	89,6	90,20	90,69	100,54
3	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	10,15	11,17	11,17	100
4	Persentase akses aman air aman perkotaan	%	84,15	86,15	86,82	100,78
5	Persentase akses aman air aman perdesaan	%	74,55	76,30	76,71	100,54

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

11. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Dinas ini menyelenggarakan urusan pekerjaan umum bidang sumberdaya air dan penataan ruang. Indikator kinerja utama dinas ini ada 3 (tiga) yaitu tingkat pelayanan sumberdaya air dan penataan ruang, persentase kualitas sarana dan prasarana sumber daya air, dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR. Dari ketiga indikator tersebut, kesemuanya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi di akhir tahun 2019.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal antara lain pembangunan dan rehabilitasi/revitalisasi embung dan waduk, pemeliharaan sarana prasarana sumberdaya air, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	61,39	62,6	62,60	100
2	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	52,67	53,45	53,45	100
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	70,12	71,75	71,75	100

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang kinerjanya diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Di akhir tahun 2019, realisasi seluruh indikator kinerja dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini merupakan bentuk dukungan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penanganan rumah tidak layak huni (*basic need*). Demikian juga untuk penanganan kawasan kumuh yang merupakan bentuk dukungan terhadap program nasional dalam pencapaian program SDGs yang dilakukan secara terintegrasi. Percepatan pencapaian kinerja ini tidak hanya didukung dari pendanaan yang bersumber dari APBD provinsi, namun juga didukung oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota, Pemerintah melalui APBN dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan, pihak swasta melalui CSR, dan sumber-sumber penadaan lainnya.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	na	2,9	6,48	223,45
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	na	77,12	61,43	125,54
3	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	108,91	108,91

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

13. Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satpol PP adalah urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasi adalah persentase kabupaten/kota yang kondusif. Dengan target 100 persen di tahun 2019, di akhir tahun tahun 2019 telah tercapai realisasi 100 persen kabupaten/kota dalam kondisi yang kondusif.

Pencapaian kinerja di tahun 2019 didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat prioritas sebagai bentuk wujud upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsinya menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, antara lain:

- a. Melaksanakan patroli wilayah, operasi bersama (lintas kabupaten/kota), operasi cipta kondisi/pekat, operasi di wilayah perbatasan provinsi serta melakukan pengamanan-pengamanan yang bersifat strategis, ini sebagai wujud untuk pengendalian dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap kondusifitas 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- b. Melakukan inventarisasi pelanggaran perda, sosialisasi dan mediasi, pembinaan, penyuluhan bagi para pelanggaran perda sebagai bentuk upaya penegakan perda yang bersifat pre-emptif dan preventif sebelum dilakukan penindakan bagi para pelanggaran produk hukum daerah serta melakukan pengamanan dan pengawasan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disamping melakukan penegakan perda di wilayah perbatasan antar provinsi (Jateng-Jatim, Jateng-DIY, Jateng-Jabar) hal ini sebagai wujud meningkatkan penegakkan produk hukum daerah Penegakkan Perda dan Pergub;
- c. Melakukan pelatihan-pelatihan/bintek bagi anggota Linmas (Bintek SAR, Deteksi Dini, PAM

- Terpadu serta ketrampilan lainnya) hal ini sebagai wujud untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya;
- d. Melakukan kegiatan penyuluhan dan deteksi dini dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran diri kepada masyarakat agar mematuhi setiap peraturan yang ada, hal ini sebagai wujud untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman.

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan persentase masyarakat terhadap politik. Di akhir tahun 2019, realisasi kedua indikator tersebut dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi. Keberhasilan tersebut didukung dengan berbagai program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan antara lain melakukan pemetaan daerah rawan konflik, deteksi dini, meningkatkan jalinan koordinasi dengan aparat keamanan dan dinas terkait serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah dengan cara mengoptimalkan peran dan fungsi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dan forum-forum lainnya yang ada di masyarakat.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	75	80	88,41	110,51
2	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	75	80	87,48	109,35

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

15. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk Sekretariat BPBD sebanyak 5 (lima) IKU. Dari kelima IKU yang ada, seluruhnya dinilai telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki semua bentuk bencana telah melakukan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan melalui pengurangan risiko bencana sampai dengan tingkat komunitas/masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dengan meningkatkan kapasitas dari masyarakat antara lain pembentukan desa tangguh bencana, pemasangan *Early Warning System* (EWS), dan rambu jalur evakuasi, pelatihan relawan penanggulangan bencana.

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	100
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,5	3,52	3,52	100
3	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	na	10	10,06	100,6
4	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	na	5	18,15	363
5	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

16. Dinas Sosial

Kinerja Dinas Sosial di tahun 2019 diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama yaitu persentase penurunan jumlah PMKS dan persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS. Kedua indikator kinerja dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi di tahun 2019. Hal ini didukung dengan berbagai upaya rehabilitasi PMKS di panti milik pemerintah provinsi secara optimal, serta didukung dengan penguatan PSKS.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	na	0,47	0,62	131,91
2	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS	%	na	6,88	8,97	130,38

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas ini menetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang menjadi ukuran kinerja organisasi. Sampai dengan akhir tahun 2019, kinerja seluruh indikator dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi (diatas 100 persen). Hal tersebut didukung dengan berbagai macam program yang dilakukan antara lain penyediaan informasi lowongan pekerjaan melalui *job fair*, bursa kerja *online*, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja dan calon tenaga kerja, pemagangan di luar negeri, fasilitasi hubungan industrial tripartit, dan lainnya.

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,5	69,04	70,27	101,78
2	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	92,11	90	92,53	102,81
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	%	54,57	54,58	56,88	104,21
4	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	6,49	6,89	7,16	103,92
5	Persentase pengangguran yang ditangani	%	20,65	24,05	25,91	107,73
6	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	97,56	94,86	94,43	100,46
7	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	53	56	56,02	100,04
8	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	86,96	87,11	93,16	106,95

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas ini menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dinas ini sebanyak 9 (sembilan) indikator. Dari sembilan indikator, di akhir tahun 2019 terdapat delapan indikator yang dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, dan satu indikator dinilai tingkat ketercapaiannya tinggi.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	74,69	75	73,48	97,97
2	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	22,86	22,86	54,28	237,45
3	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,2	8,16	7,78	104,88
4	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	na	2,26	2,23	98,36
5	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	22,14	21,64	22,00	98,36
6	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	na	34,18	34,28	100,29
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,44	8,16	7,78	104,88
8	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	82,86	82,86	91,43	110,34
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	74,03	75,12	74,03*)	98,55

Keterangan:

a. Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

b. *) Data capaian tahun 2018 yang dirilis Bulan Agustus 2019

19. Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang di akhir tahun 2019 semuanya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi. Pencapaian indikator kinerja utama didukung oleh peningkatan konsumsi dan ketersediaan buah, sayur, daging dan ikan. Selain itu juga didukung oleh peningkatan keanekaragaman pangan utamanya umbi-umbian sebagai pangan alternatif sebagai sumber energi.

Tabel 3.16
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	87,3	87,36	89,61	102,58
2	PPH Ketersediaan	Angka	85,3	82,5	86,00	104,24
3	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	kcal/kapita/hari	2.090,17	2.150	2.151	100,05
4	Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	Gram/kapita/hari	63,7	57	61,83	108,47

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas ini melaksanakan dua urusan pemerintahan yaitu urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan. Di tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan *stakeholder* terkait telah melakukan penanaman $\pm 23.308,85$ ha (eq. 9.323.540 batang), membangun bangunan konservasi berupa Sumur Resapan dan Dam Penahan untuk meningkat resapan air kedalam tanah, melakukan GPS (Gerakan Pungut Sampah) dalam berbagai even sebagai bentuk kampanye lingkungan, mendorong semakin bertumbuhnya PROKLIM (Program Kampung Iklim), melaksanakan PROPERDA (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), memfasilitasi berbagai kelompok masyarakat melalui penyediaan sarana produktif bagi kelompok-kelompok masyarakat, antara lain Kelompok Tani Hutan, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Disamping itu juga memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mengelola lingkungan, misalnya dengan penyediaan IPAL komunal bagi UMKM, peralatan pengelola sampah, dan sebagainya.

Berikut gambaran ketercapaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019.

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	66,76	66,76	65,73	98,46
2	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43	0,43	0,46	106,98
3	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	0,2	100
4	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,45	3,41	101,17
5	Indeks Kualitas udara	%	84,21	84,51	84,81	100,35
6	Indeks Kualitas Air	%	48,47	48,77	50,47	103,49
7	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	-2,49	-529,78
8	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km ²	16.555,86	16.555,86	15.323,18	92,55

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Dari kedelapan indikator tersebut sebanyak 7 indikator dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, dan satu dengan tingkat ketercapaian sangat rendah. Indikator yang dinilai tingkat ketercapaiannya sangat rendah adalah pertumbuhan PDRB subsektor kehutanan, yang disebabkan produksi kayu terutama yang berasal dari Perum Perhutani mengalami penurunan cukup drastis karena permintaan pasar yang juga menurun, serta mulai bergesernya pemanfaatan ekonomi dari kawasan hutan sebagai sumber produksi kayu menjadi pariwisata dan jasa lingkungan, yang dalam perhitungan PDRB tidak termasuk dalam variabel perhitungan sumber PDRB sub sektor kehutanan.

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja dinas ini diukur dari dua indikator kinerja utama yang menggambarkan dua urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan. Urusan yang dilaksanakan dinas ini adalah urusan pemberdayaan masyarakat desa, dan urusan kependudukan dan catatan sipil. Sampai akhir tahun 2019, seluruh indikator dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi yaitu persentase peningkatan desa mandiri, dan cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan.

Tabel 3.18
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
 Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	na	12,99	34,49	304
2	Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	%	100	100	100	100

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

22. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasinya. Di akhir tahun 2019, ketiga indikator kinerja utama dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Tabel 3.19
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	6,08	8,69	9,26	106,56
2	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	30,34	34,75	36,02	103,65
3	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	26,67	33,33	33,67	101,02

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan di tahun 2019 merupakan implementasi dari kebijakan strategis jangka menengah diantaranya menurunkan tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas (termasuk didalamnya keselamatan perlintasan sebidang dengan kereta api dan angkutan laut serta perairan daratan); meningkatkan pelayanan Terminal

Tipe B; dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Pengembangan dan Pembangunan Bandara, Reaktivasi Rel Kereta Api, dan Pengembangan Pelabuhan).

Kegiatan kongkrit yang dilakukan di tahun 2019 yang juga merupakan implementasi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi pengembangan transportasi massal berupa pengembangan angkutan aglomerasi BRT Trans Jateng yang terdiri dari Koridor Semarang – Kendal (koridor baru di tahun 2019), Purwokerto – Purbalingga (lanjutan operasional sejak 2018); Semarang – Bawen (lanjutan operasional sejak tahun 2017), fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api non aktif yang terdiri dari jalur Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dan jalur Purwokerto-Wonosobo, serta fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang – Solo; dan fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah berupa *sharing* pembebasan lahan Bandara J.B Soedirman di Purbalingga.

23. Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistika, dan urusan persandian. Untuk mengukur kinerja organisasi dalam melaksanakan ketiga urusan ini telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama. Dari kelima indikator, di akhir tahun 2019 seluruhnya dinilai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Untuk indikator laju pemanfaatan data sektoral realisasinya cukup tinggi dari target karena adanya respon sangat positif dari masyarakat untuk selalu membuka aplikasi/memanfaatkan aplikasi karena ada penambahan menu-menu informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan potensi Jawa Tengah tentang pariwisata, kuliner, *event* Jawa Tengah, *job fair* dan lainnya.

Tabel 3.20

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2,3	2,4	3,71	154,58
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	2,69	2,82	3,41	120,92
3	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	2,93	3,06	4,06	132,68
4	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	8,21	15,18	60,00	395,26
5	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	1	1,00	2,90	290

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

24. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja dinas ini diukur dari dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase pertumbuhan omzet koperasi dan UKM Jawa Tengah dan persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi dan UKM Jawa Tengah. Di akhir tahun 2019, kedua indikator tersebut dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk dalam mencapai kinerja yang optimal serta mendukung implementasi program unggulan daerah antara lain kemudahan akses kredit bagi UKM, pelatihan *start up* untuk wirausaha muda melalui *short course* pengembangan potensi lokal bagi wirausaha baru, layanan pendampingan UKM, serta NGUCING (Ngobrol Usaha Mancing Ilmu) yang dilaksanakan di UMKM Center Jawa Tengah.

Tabel 3.21

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	16,68	18,78	20,45	108,89
2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	18,22	20,5	21,84	106,54

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Iklm penanaman modal di Jawa Tengah sepanjang tahun 2019 semakin kondusif. Hal ini terlihat dengan capaian kinerja indikator utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi. Indikator tersebut adalah persentase realisasi PMA dan PMDN yang mencapai 125,47 persen dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan sebesar 90,10.

Upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun 2019 antara lain pengembangan *e-warning system* pada aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jawa Tengah, pemrosesan izin melalui system *Online Single Submission* (OSS), digitalisasi promosi investasi, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta memfasilitasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya. Dalam rangka menawarkan peluang investasi, khususnya pada sektor manufaktur, infrastruktur, pertanian, pariwisata, properti, energi dan pertambangan di Jawa Tengah telah dilaksanakan kegiatan *Central Java Investment Business Forum (CJIBF)* Tahun 2019 di Jakarta dengan menjaring kepedulian investasi sebesar Rp 57,00 Trilyun dan US\$ 413,600,000. Pencapaian realisasi investasi yang telah meningkat tersebut tetap harus dibarengi perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif.

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	126	100	125,47	125,47
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,65	90	90,1	100,11

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Kinerja dinas ini diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi persentase realisasi PMA dan PMDN, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kedua indikator kinerja tersebut di tahun 2019 dinilai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. Meskipun demikian untuk pencapaian indikator IKM masih perlu perbaikan dalam variabel Sistem Mekanisme dan Prosedur serta waktu penyelesaian. Hal ini dikarenakan masih adanya penyelesaian perizinan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan instansi teknis terkait.

26. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Dinas ini menyelenggarakan dua urusan yaitu urusan kepemudaan dan olahraga, serta urusan pariwisata. Indikator kinerja utama dinas ini sebanyak 3 (tiga) IKU meliputi Indeks Pembangunan Keolahragaan, Indeks Pembangunan Pemuda, dan Kontribusi PDRB bidang pariwisata. Dari ketiga indikator tersebut seluruhnya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda, didukung program kerja antara lain melalui program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan pelatihan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster, program peningkatan lapangan kerja dengan kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) yang merekrut sarjana dan ditempatkan di 15 Kabupaten Zona Merah dengan tujuan untuk menggerakkan peningkatan ekonomi di pedesaan.

Untuk pencapaian Indeks Pembangunan Keolahragaan telah dilakukan beberapa upaya antara lain melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) serta Pembinaan Sentra Olahraga Jangka Panjang (PSOJP), peningkatan SDM keolahragaan melalui pelatihan sertifikasi wasit dan pelatih, mendorong partisipasi masyarakat untuk gemar berolahraga dan kebugaran jasmani melalui program senam bersama.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan pariwisata di Jawa Tengah telah juga dilakukan beberapa upaya antara lain percepatan penataan dan kerjasama pengelolaan 4 Kawasan KSPN/KSPP (Karimun Jawa, Borobudur, Dieng dan Sangiran); pengembangan dan pemberdayaan desa wisata (pembinaan pengelolaan desa wisata); sertifikasi usaha jasa dan

sarana pariwisata; sertifikasi sdm pariwisata dan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif (kriya, kuliner, fashion dan seni pertunjukan); pengembangan dan pemberdayaan kelompok sadar wisata; fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Desain Brand, dan pengembangan Kota Kreatif; serta promosi pariwisata skala nasional dan internasional.

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,55	0,58	0,55*)	94,83
2	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,15	3,17	3,21	101,26
3	Indeks Pembangunan Pemuda	%	50,17	50,2	52,17	103,92

Keterangan:

- a. Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:
 - 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
 - 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
 - 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
 - 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
 - 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)
- b. Angka *) merupakan angka capaian di tahun 2018

27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas ini melaksanakan dua urusan pemerintahan yaitu urusan kearsipan dan urusan perpustakaan. Di akhir tahun 2019, indikator yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan kearsipan yaitu persentase sistem pengelolaan kearsipan yang terintegrasi dinilai tingkat ketercapaian sangat tinggi. Demikian juga untuk indikator persentase peningkatan pengunjung perpustakaan, di akhir tahun 2019 masih dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Salah satu program inovasi yang sudah dikembangkan dalam mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut yaitu pengembangan aplikasi "iJateng", perpustakaan digital berbasis Andoid. Sedangkan untuk kearsipan telah juga dikembangkan aplikasi "Arsip EMAS (Arsip Elektronik Masyarakat)", aplikasi kearsipan berbasis Android, dimana masyarakat Jawa Tengah dapat menyimpan arsip mereka ke *server* Dinas Arpus, dan dapat diunduh kapanpun dimanapun.

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	%	na	21	21,27	101,29
2	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	na	24	24,19	100,79

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

28. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, ditetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu produksi perikanan dan angka konsumsi ikan. Kedua indikator tersebut di akhir tahun 2019 dinilai tingkat ketercapaian kinerjanya sangat tinggi.

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	30,65	30,5	33,58	110,10
2	Produksi Perikanan	Ton	956.601,65	857.758,41	1.008.721,49	127,60

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja tersebut antara lain pengembangan fungsi pelabuhan sebagai pusat aktifitas perekonomian masyarakat nelayan, pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan (jaring dan bubu), *coolbox*, alat bantu navigasi, serta bantuan premi asuransi bagi nelayan kecil. Upaya lainnya adalah peningkatan penjaminan kesehatan dan mutu ikan serta keamanan pangan melalui penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) bagi pemasok bahan baku di Jawa Tengah dan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dengan melibatkan TP PKK dan FORIKAN.

29. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kinerja utama dinas pertanian dan perkebunan adalah meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian untuk beberapa komoditas utama di Jawa Tengah. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama dinas ini yang mencerminkan komoditas utamanya. Dari delapan IKU yang ada, sebanyak empat indikator dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi yaitu kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (jagung, kelapa, kopi, dan tebu), tiga komoditas tingkat ketercapaiannya tinggi (bawang merah, padi, dan cabe besar), dan satu komoditas dengan tingkat ketercapaian rendah yaitu kedelai. Faktor cuaca yang cukup berpengaruh terhadap produksi pertanian yang belum optimal sesuai dengan target yang ditentukan. Meskipun demikian telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pertanian yaitu antara lain penyediaan jaringan irigasi, bantuan penggunaan bibit/benih unggul dan bermutu, bantuan penggunaan pupuk berimbang, gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), fasilitasi pasca panen berupa bantuan alat pasca panen, bantuan alsintan, dan pengembangan sumberdaya petani dengan mendorong pemuda tani dalam bentuk bimbingan teknis petani milenial.

Tabel 3.26

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (bawang merah)	Ton	507.268	528.537	471.447	89,20
2	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (padi)	Ton	11.401.629	11.543.015	9.655.654	83,65
3	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (cabe besar)	Ton	197.266	200.836	163.873	81,60
4	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kedelai)	Ton	130.525	102.726	66.701	64,93
5	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (jagung)	Ton	3.688.477	3.660.360	3.390.977	92,64
6	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman	Ton	158.299	164.248	168.593,14	102,65

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	pangan, hortikultura, dan perkebunan (kelapa)					
7	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kopi)	Ton	17.456	20.482	22.831,58	111,47
8	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (tebu)	Ton	2.638.785	2.934.025	2.851.955,46	97,20

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

30. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kinerja dinas ini ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu produksi susu, produksi telur, dan produksi daging. Sampai dengan akhir tahun 2019, produksi semua komoditas dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Tabel 3.27

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Produksi Susu	Liter	101.511.053	101.460.171	100.799.241	99,35
2	Jumlah Produksi Telur	Kg	312.420.004	310.234.990	313.445.193	101,03
3	Jumlah Produksi Daging	Kg	359.988.398	315.873.883	358.081.715	113,36

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas ini menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasinya. Indikator tersebut meliputi rasio ketersediaan daya listrik, indeks ketersediaan air tanah, persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi,

dan persentase ijin usaha pertambangan operasi produksi. Sampai dengan akhir tahun 2019, keempat indikator dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Pencapaian kinerja tersebut karena juga didukung dengan berbagai macam program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2019. Dalam rangka mencapai rasio ketersediaan daya listrik dilakukan beberapa upaya antara lain pembangunan pembangkit yang telah COD di tahun 2019 yaitu PLTU S2P Karangandri Cilacap, pembangunan konstruksi jaringan listrik SUTET, pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin, serta pemberian rekomendasi teknis ijin ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan listrik di kawasan industri.

Dalam rangka peningkatan bauran energi baru terbarukan juga dilakukan berbagai upaya diantaranya terbangunnya beberapa proyek pembangunan yang memanfaatkan potensi EBT seperti pembangunan fasilitas *Refused Derivied Fuel* (RDF) TPA Jeruk Legi Cilacap, konversi gas menjadi listrik di TPA Jatibarang Kota Semarang, pengolahan limbah pati onggok Klaten menjadi gas rumah rangka, dan pembangunan PLTS komunal Karimunjava, yang seluruhnya merupakan proyek kerjasama Indonesia dengan Kerajaan Denmark. Selain itu, dengan pendanaan APBD juga dibangun *digester* biogas, gas rawa, pemasangan *rooftop*, dan revitalisasi PLTMH. Pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah juga didukung melalui pendanaan APBN, swasta (industri), perguruan tinggi dan masyarakat melalui pemasangan PLTS *rooftop* (pada ponpes, industri, dan rumah tangga), pembuatan *digester* biogas, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) melalui tenaga angin dan matahari di Cilacap.

Terkait dengan pencapaian indeks ketersediaan air tanah juga didukung beberapa program kerja antara lain melakukan kajian hidrogeologi yang komprehensif dalam rangka pemberian rekomendasi teknis yang ketat terhadap permohonan izin pemanfaatan dan pengusahaan airtanah, khususnya pada daerah yang masuk zona rawan dan kritis terhadap pengambilan air tanah; melakukan pengawasan dan pengendalian air tanah pada obyek yang memanfaatkan/mengusahakan air tanah secara langsung maupun tidak langsung melalui sumur pantau (telah terbangun 3 unit sumur pantau di Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Pekalongan pada tahun 2019); melakukan upaya konservasi air tanah dengan membuat sumur resapan dangkal (telah dibangun sebanyak 90 unit sumur resapan pada tahun 2019 di Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Kudus); menggiatkan sosialisasi budaya hemat menggunakan air serta mendorong penggunaan air permukaan (salah satunya dengan melaksanakan kegiatan lomba Hemat energi dan Air).

Sedangkan untuk ketercapaian indikator ijin usaha pertambangan operasi produksi didukung dengan beberapa hal diantaranya meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk mengajukan izin usaha Pertambangan, terbukti dengan menurunnya luas area penambangan tanpa izin (PETI); melakukan upaya pembinaan usaha pertambangan pada pelaku usaha tambang; adanya pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang membutuhkan material hasil tambang, seperti pada Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK), konstruksi pembangunan pabrik semen Grobogan (rencana COD pertengahan tahun 2020) sehingga meningkatkan permohonan izin usaha Pertambangan; serta Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi dari pelaku usaha tambang setelah terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan.

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	10,8	11,1	11,69	105,32
2	Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	%	64,23	65	66,00	101,54
3	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3,06	3,05	3,08	100,98
4	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1,12	1	1,17	117

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Guna mengukur kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah ditetapkan dua indikator kinerja utama yaitu persentase laju pertumbuhan sektor industri dan persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan. Penetapan IKU dengan memperhatikan dua urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh dinas ini yaitu urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Sampai dengan akhir tahun 2019, capaian indikator persentase laju pertumbuhan sektor industri dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi dimana realisasinya sebesar 5,19 persen dari target 4,85 persen. Sedangkan untuk indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan tingkat ketercapaiannya tinggi dengan realisasi sebesar 5,98 persen dari target 6,98 persen.

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	4,61	4,85	5,19	107,01
2	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	5,22	6,98	5,98	85,67

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

33. Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah diukur dengan 32 (tigapuluh dua) indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja sekretariat daerah beserta 9 (sembilan) biro sebagai unit kerjanya. Sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 31 indikator kinerja dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi, dan satu indikator kinerja lainnya dinilai tingkat ketercapaiannya tinggi. Berbagai upaya strategis yang dilakukan di lingkup Sekretariat Daerah pada tahun 2019 dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain pembentukan biro APBJ, pengembangan e-SAKIP, pengembangan e-Controlling Kinerja, pengembangan dan pemanfaatan TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik), serta pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Terpadu BUMD.

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	na	80	93,02	116,28
2	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	na	80	86,36	107,95
3	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	na	75	75,63	100,84
4	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	na	85	100	117,65
5	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	na	85	100	117,65
6	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	na	70	71	101.43
7	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	na	85	85,71	100,84
8	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	na	80	83,05	103,81
9	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	na	90	100	111.11
10	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	na	81	100	123,46
11	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	Skor	na	80	81	101,25

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	na	80	96,60	120,75
13	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	na	80	95,63	119,54
14	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	na	90	100	111.11
15	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	na	90	100	111.11
16	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	na	90	100	111.11
17	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	%	na	19	24,78	130,42
18	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	na	52,10	92,63	177,79
19	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	na	73	75	102,74
20	Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya	%	na	25	40	160
21	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	na	80	100	125
22	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	na	85	88,46	104,07
23	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	na	85	87,50	102,94
24	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	na	60	96,93	161,55
25	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	na	85	85,71	100,84
26	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	na	80	75	93,75
27	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	na	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	na	85	85,41	100,48
29	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	na	100	90	90
30	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	na	100	100	100
31	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	na	100	100	100
32	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolanan dan Kehumasan	%	na	75	75,63	100,84

Keterangan:

- a. Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:
 - 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
 - 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
 - 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
 - 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
 - 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)
- b. Data tahun 2018 tidak tersedia, karena indikator kinerja di setda merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan di tahun 2019

34. Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD diukur dari satu indikator kinerja utama yaitu indeks kepuasan atas kualitas layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan akhir tahun 2019, IKU Sekretariat DPRD dinilai telah sesuai dengan target, dengan realisasi 71,07 persen dari target sebesar 71 persen.

Dari 9 unsur yang di survei terdapat 2 unsur yang paling menonjol dengan nilai rata-rata 3,00. Yaitu unsur prosedur pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan unsur fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan. Artinya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat puas dengan 2 unsur tersebut.

Sedangkan unsur yang paling kurang menonjol dengan nilai rata-rata paling rendah 2,625 yaitu kecepatan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dapat dikatakan bahwa saat ini Anggota DPRD belum cukup puas dengan kecepatan pelayanan Sekretariat DPRD.

35. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kinerja Bappeda diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yang menggambarkan dua fungsi penunjang pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bappeda yaitu fungsi perencanaan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Sampai dengan tahun 2019, ketiga indikator tersebut dinilai tercapai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain mengembangkan instrumen pendukung proses perencanaan yaitu aplikasi *e-planning* yang terintegrasi dalam sistem GRMS, penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yang diintegrasikan dalam sistem *e-planning*, koordinasi perencanaan sektoral dan lintas sektor, serta koordinasi perencanaan dan litbang dalam pemanfaatan hasil litbang.

Tabel 3.31

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase hasil kelitbang iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	%	na	90	90	100
2	Persentase Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	na	90	92,94	103,27
3	Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	%	na	90	91,47	101,63

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

36. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi yaitu persentase peningkatan pajak daerah, dan persentase peningkatan penerimaan retribusi dan pendapatan lain. Dari kedua indikator tersebut sampai dengan akhir tahun 2019 untuk indikator persentase peningkatan pajak daerah dinilai tingkat ketercapaiannya sangat rendah, dan indikator persentase peningkatan penerimaan retribusi dan pendapatan lain tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pajak daerah, serta retribusi dan pendapatan lainnya. Peningkatan pajak daerah antara lain dilakukan melalui upaya inovasi dengan menambah titik layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling, gerai, samsat cepat dan Sakpole, serta penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kegiatan *Door to Door* (penagihan secara langsung ke wajib pajak yang menunggak dan kegiatan Razia gabungan dengan POLRI). Sedangkan untuk meningkatkan retribusi dan pendapatan lainnya telah juga dilakukan beberapa upaya yaitu melalui Sosialisasi,

Koordinasi, monitoring evaluasi secara periodik dengan *stakeholder* terkait (OPD, Balai dan UPD penghasil Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah).

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan pajak daerah	%	na	8,05	3,87	48,07
2	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain	%	na	11,35	13,41	118,15

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja Utama BPKAD sebanyak dua indikator yaitu persentase pemanfaatan aset dan persentase tata kelola keuangan pemda yang sesuai kaidah perundangan. Sampai dengan tahun 2019, kedua indikator ini dinilai telah tercapai dengan tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pemanfaatan aset	%	60	62,5	63,00	100,8
2	Persentase tata kelola keuangan pemda yang sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

38. Badan Kepegawaian Daerah

Fungsi penunjang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang kinerjanya dapat diukur dengan dua indikator kinerja utama yaitu persentase distribusi penempatan PNS dalam jabatan, dan persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi. Sampai akhir tahun 2019, kedua indikator dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi. Keberhasilan kinerja ini dalam rangka mendukung ketercapaian implementasi sistem merit di Jawa Tengah.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan kepegawaian sebagai bentuk dukungan implementasi sistem merit antara lain pengembangan *assessment centre* dan pemetaan kompetensi, pengembangan dan integrasi *e-performance*, penempatan pegawai baru sesuai dengan jabatan yang dilamar, pengembangan sistem informasi mempermudah pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pensiun, BPJS, cuti, dan lainnya.

Provinsi Jawa Tengah oleh KASN ditetapkan masuk dalam kategori III (Baik) karena sudah memenuhi sebagian besar kriteria sistem merit dalam manajemen ASN, dan dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pengisian JPT melalui *talent pool* untuk jabatan tertentu apabila *talent pool* dan rencana suksesinya sudah diperbaiki serta tetap dengan pengawasan oleh KASN.

Tabel 3.34

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100	100	100	100
2	Persentase Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	100	100

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

39. Inspektorat

Fungsi pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dengan indikator kinerja utamanya yaitu level 3 penuh kapabilitas APIP, dan nilai 3,5 maturitas SPIP. Sampai dengan akhir tahun 2019 kedua indikator dinilai telah tercapai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Tabel 3.35
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan		Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Level 3 penuh Kapabilitas APIP	Nilai	3	3	3	100
2	Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Nilai	3,02	3,1	3,158	101,87

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan target tahun 2019 (R/T), dengan kategori:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$ (Biru)
- 2) Tinggi : 76 – 90,99% (Hijau)
- 3) Sedang : 66 – 75,99% (Kuning)
- 4) Rendah : 51 – 65,99% (Ungu)
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$ (Merah)

40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kinerja utama badan ini adalah meningkatnya ASN Provinsi Jawa Tengah yang tersertifikasi kompetensi, dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi. Capaian tahun 2019 adalah sebesar 35,22 persen dari target sebesar 35,01 persen atau tingkat ketercapaiannya sebesar 100,59 persen yang berarti masuk kategori tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja BPSDM di tahun 2019 antara lain pembentukan *Jateng Corporate University* sebagai wujud integrasi pengembangan kompetensi ADN untuk mewujudkan *Jateng Pinter Bareng*, pembentukan lembaga sertifikasi profesi yang mandiri, akreditasi beberapa pelatihan baik manajerial, teknis dan fungsional, penjaminan mutu kelembagaan melalui ISO 9001 2015, integrasi sistem pengembangan kompetensi mulai perencanaan sampai dengan evaluasi melalui aplikasi Simapan SDM, serta penguatan lembaga sertifikasi profesi melalui pembentukan skema sertifikasi dan penambahan kompetensi asesor.

41. Badan Penghubung

Untuk kinerja badan penghubung ditetapkan satu indikator yaitu nilai survey kepuasan masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2019 kinerja indikator tersebut mencapai angka 82,25 persen, melebihi target yang ditetapkan sebesar 82 persen. Sehingga tingkat ketercapaian indikator kinerja tersebut sebesar 100,24 persen atau dinilai dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. Dari beberapa variabel survei kepuasan yang dilakukan, terdapat satu variabel unsur pelayanan yang perlu dievaluasi yaitu terkait dengan biaya. Variabel tersebut menjadi variabel dengan nilai terkecil dari 4 unsur pelayanan lainnya (persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan).